

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara terencana guna mendapatkan hasil yang lebih baik, atau adanya perubahan dalam sebuah objek yang direncanakan. Sama seperti pembangunan yang dilakukan dibelahan dunia manapun, Indonesia sendiri melakukan sebuah pembangunan dengan konsep dan kategori yang sama berupa pembangunan yang mengarah kepada pembangunan materil dan non materil. Indonesia merupakan sebuah negara dengan bentuk pemerintahan Republik Presidensial yang dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang Presiden yang bertindak langsung sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang multipartai yang demokratis sama seperti negara-negara lain yang menurut sistem demokrasi lainnya di dunia. Dalam sejarahnya Indonesia memiliki sebuah perjalanan panjang dalam proses pemerintahan sehingga pada akhirnya sampai lah pada titik ini dengan menganut sistem pemerintahan yang demokrasi.

Sistem pemerintahan yang demokrasi akan selaras dengan proses perencanaan pembangunan di negara tersebut. Dalam hal ini pembangunan Indonesia pada era dan sebelum masa orde baru melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada GBHN yaitu garis besar haluan negara, yang merupakan dokumen acuan dalam bernegara dan tertuang dalam rencana pembangunan lima tahunan, namun setelah reformasi bergulir konsep tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diganti dengan nama baru yang lebih dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adapun target- target upaya percepatan pembangunan nasional terutama dalam hal ekonomi tertuang dalam sebuah *masterplan* pembangunan yaitu Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disingkat (MP3EI) yang didalamnya muat tentang target dan nilai Investasi rencana pembangunan nasional.

Sejarah baru mengenai perjalanan pembangunan di Indonesia bermula setelah bergulurnya Reformasi 1988. Pada saat itu lahirlah sebuah paradigma baru dalam pembangunan di Indonesia dengan nama Desentralisasi, yang bermakna bahwa daerah diberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi urusannya sendiri berdasarkan prakarsa dari rakyatnya dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia UU No 23 Tahun 2014.

Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadi perubahan struktur fisik atau material. Tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat.pembangunan harus mamapu membawa umat manusia melampaui mengutamakan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari.pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.

Adapun proses desentralisasi itu sendiri melaksanakan perjalanan yang sangat panjang dimulai dari UU No. 22 Tahun 1999 kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2004 karena dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut dirasa dalam prosesnya pemerintahan yang berjalan di daerah semakin tidak terkendali karena itu lahirlah UU No. 32 tahun 2004 revisi atas regulasi terdahulu sebagai regulasi pemerintahan daerah, namun setelah kurang lebih dari sepuluh tahun maka dilakukan perundang-undangan baru dengan dipecahkan UU No. 32 Tahun 2014 yang memberikan rincian tugas dan kewenangan daerah.

Selanjutnya lebih terperinci lagi tentang Pembangunan Daerah Pedesaan. Dalam hal ini pemerintah terus meningkatkan pembangunan pedesaan hingga terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengaturan desa berasaskan: Rokognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kebersamaan, Kegotong royongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi dan Kesertaan.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Selama ini kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan desa selalu bersifat *Top down* dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat. berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, kenyataan sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Pembangunan selama ini, lebih banyak diarahkan di kota hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadi migrasi dari desa ke kota. Masyarakat desa dengan sengaja keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib sebagian besar dari mereka menjadi persoalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bedar di kota. Disisi lain, kondisi desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh. Infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktifitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan juga terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya yaitu dengan merantau ke kota.

Pada kenyataannya seluruh potensi SDM, sebagian aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan terintegrasi. Fakta lain memperlihatkan eksploitasi SDM didesa secara besar-besaran, dengan tidak mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat, menyebabkan kerusakan lingkungan baik fisik maupun sosial. Kondisi lingkungan menjadi rusak, demikian juga terjadi transformasi kultur secara negatif. Sebagai akibat masuknya pendatang baru yang menyebabkan strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penanggung jawab program desa Suligi adalah kepala desa, maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus dikelola secara Transparan, seperti Pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui oleh masyarakat, baik dibidang Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan hasil Pembangunan.

Desa Suligi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Desa ini terbilang Luas yaitu 16800 km atau 1680 Hektar, Adapun jumlah penduduk didesa ini adalah sebanyak 2759 jiwa yang tersebar di wilayah 6 RW. Pendapatan di desa ini adalah dari sector Perkebunan Karet, Sawit dan bercocok Tanam. Adapun pekerjaan Masyarakatnya Bertani dan sebagaian lagi berkebun. Pendapatan pendapatan masyarakat di desa Tersebut tergantung dengan harga karet, sawit dan sampai saat ini harga karet dan sawit masih sangat rendah, dan akses yang sangat sulit sehingga pendapatan masyarakat masih sangat minim.

Desa Suligi merupakan salah satu desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa lainnya. Desa ini belum mencapai Indikator Keberhasilan Pembangunan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya listrik didesa tersebut dan akses yang sulit karena belum adanya infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan dan lain lain.

Dalam kaitannya dengan Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto berdasarkan hasil survey awal peneliti menemukan fenomena-fenomena bahwa:

Pertama: sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang akan hanya memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut.

Ketiga, SDM di desa baik aparaturnya maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari kabupaten, provinsi dan nasional merupakan faktor utama lain yang menyebabkan lambat proses pembangunan desa.

Keempat, perencanaan yang disusun walaupun telah melalui proses panjang, yaitu dari Musrenbangdes, Musrenbangda, tetap tidak menunjukkan suatu steamline yang jelas serta tidak menunjukkan keterpaduan program.

Tabel 1.1 Daftar Kegiatan pembangunan Musrenbangdes

NO	Kegiatan	Volume	Keterangan
I Bidang Ekonomi			
1.	Lantai Pasar Senin 10m x12m	2Unit	APBD Kabupaten
2.	Rehap Lantai Pasar Senin 8m x12m	2 Unit	APBD Kabupaten
3.	Draenase Jalan Pasar Senin 200m	1 Unit	APBD Kabupaten
4.	Draenase Belakang Pasar 200m	1 Unit	APBD Kabupaten
5.	Pembangunan Los Pasar Senin 8m x12m	2 Unit	APBD Kabupaten
6.	Pembangunan Tempat Parkir 4m x12m	2 Unit	APBDesa
7.	Pembangunan Jalan Baru Ladang Timur 12km	1 Unit	APBDesa
8.	Penimbunan Lokasi Pasar Senin 1500m	1 Unit	APBD Provinsi
II Bidang sosial			
9.	Draenase Jalan Masjid Jamik 400m	1 Unit	APBDesa
10.	Pagar TPU 200M	1Unit	APBDesa
11.	Gapura TPU	1Unit	APBDesa
12.	Penimbunan Halaman Masjid Jamik 100m	1 Unit	APBDesa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III	Bidang Pengentasan Kemiskinan		
13.	Bantuan Ternak Sapi 5 Kelompok	100 Ekor	APBD Kabupaten
14.	Bantuan 15 layak huni 15KK	25 Unit	APBD Kabupaten
15.	Bantuan Bibit Perkebunan Buah-buahan 500KK	2000 Batang	APBD Kabupaten
16.	Bantuan Ternak Kambing 3 Kelompok	60 Ekor	APBD Kabupaten

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2015

Tabel 1.2 Daftar Kegiatan pembangunan Musrenbangdes

NO	Kegiatan	Volume	Keterangan
I	Bidang Pembangunan Fisik		
1.	Jembatan jalan Kabupaten 7m x5m	1Unit	APBD TK.II
2.	Cor Beton jalan Kabupaten Suligi- Bengkolan Salak	4 Unit	APBD TK.II
3.	Cor Beton jalan Simpang Pir-Pendalin	28 Unit	APBD Kabupaten
4.	Pembangunan Gedung SD 002 Desa Suligi	1 Lokal	APBDesa
5.	Pembangunan Gedung SD 004 Desa Suligi	1 Lokal	APBDesa
6.	Pembangunan Gedung PAUD Melati	1 Unit	APBD
7.	Semenisasi jalan lorong Desa	2km	APBN
8.	Pembangunan Gedung MDA	6.470m	APBD TK.II
II	Bidang Pengentasan Kemiskinan		
9.	Bantuan Sapi Bali 5 kelompok (80 KK)	93 ekor	APBD Kabupaten
10.	Bantuan Rumah Layak Huni	5 rumah	APBDesa
11.	Bantuan Bibit Matoa	25.000 batang	APBD Kabupaten
12.	Bantuan Bibit Sukun	2000 batang	APBD Kabupaten
III	Bidang Kesenian, Sosial dan budaya		
13.	Bantuan Alat Musik Band	1 Set	APBD Kabupaten
14.	Bantuan Peralatan Olahraga	1 Set	APBD Kabupaten
15.	Bantuan Kesenian Tradisional (Kuda Kepang /campur sari)	1 Set	APBD Kabupaten

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Daftar Kegiatan pembangunan Musrenbangdes

NO	Kegiatan	Volume	Keterangan
I	Bidang Pendidikan		
1.	Rehap Gedung TK 6m x 12m	1 Lokal	APBD TK.II
2.	Rehap Gedung PAUD Melati	1 Lokal	APBD TK.II
3.	Pembangunan Gedung Pustaka Sekolah SD.002 dan 004	2 Unit	APBD Kabupaten
4.	Rehap Rumah Dinas Guru SD.002 7m x 9m	5 Lokal	APBDesa
5.	Rehap Rumah Dinas Guru SD.004 7m x 9m	3 Lokal	APBDesa
6.	Pembangunan Gedung PAUD Nusa Indah	1 Lokal	APBD
7.	Turap Depan SD 002 160m	1 Unit	APBN
8.	Pagar halaman SD 002 160m	1 Unit	APBD TK.II
II	Bidang Kesehatan		
9.	Pembangunan Gedung Posyandu 4m x 6m	2 Unit	APBDesa
10.	Lapangan Volly depan Balai Desa	1 Unit	APBDesa
11.	Lapangan Volly depan SD 002	1 Unit	APBD Kabupaten
12.	Lapangan Volly deapan SD 004	1 Unit	APBD Kabupaten
III	Bidang Sosial		
13.	Draenase jalan Masjid Jami' 400m	1 Unit	APBDesa
14.	Pagar TPU 200m	1 Unit	APBDesa
15.	Penimbunan Halaman Masjid Jami'	1 Unit	APBDesa

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2017

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan menformulasikan suatu program yang bersifat charity, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai patner utama dalam sistem pembangunan nasional. Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada dipemerintah kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah desa terhadap upaya pembangunan desa hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pembangunan di desa Suligi yang acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Tabel 1.4 Daftar Kegiatan Pembangunan yang dibiayai ADD, Bagi Hasil, Silva

NO	Kegiatan	Volume	Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Keterangan
I	Sarana Prasarana Fisik				
	1. Pembangunan Balai Pertemuan masyarakat secara bertahap	1	Unit	33.068.000	ADD dan Silva
	2. Pembangunan Pagar Kantor Desa	100	M	18.636.000	Bagi Hasil, PBB
	3. Pembangunan Jembatan Blok 9	100	M	5.000.000	Dana Desa
	4. Pembangunan Plavon Gedung TK	200	M	7.513.000	Bagi Hasil, PBB
	5. Pembangunan Atap Gedung Bumdes	350	M	7.400.000	Bagi Hasil, PBB, Pades, Silva
	6. Pembangunan Box Culvert		M	18.100.000	Dana Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II	Ekonomi				
	7. Perawatan Kantor Desa	1	Unit	5.000.000	Pades
	8. Semenisas Jalan Dusun 1	2	Km	40.397.500	Dana Desa
III	Sosial				
	11. Pembangunan Semenisasi jalan Produksi	1	Unit	45.125.000	Dana Desa
	12. Pembangunan jalan semenisasi jalan trobosan	50	M	44.893.000	Pades

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2015

Tabel 1.5 Daftar Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBDesa, Swadaya, dan Pihak Ketiga

NO	Kegiatan	Volume	Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Keterangan
I	Sarana Prasarana Fisik				
	1. Pembangunan Turap	1	Unit	55.926.800	Swadaya
	2. Pembangunan Draenase	100	M	211.044.700	APBDesa
	3. Pembangunan Rapat beton	100	M	147.954.850	APBD Kabupaten
	4. Pembangunan Box Sulver	200	M	72.524.200	Bagi Hasil, PBB
	5. Pembanguna Draenase	350	M	147.957.800	APBD Kabupaten

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Daftar Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBDesa, Swadaya dan Pihak Ketiga

NO	Kegiatan	Volume	Satuan	Perkiraan Biaya (Rp)	Keterangan
I	Sarana Prasarana Fisik				
	1. Pembangunan Balai Pertemuan masyarakat secara bertahap	1	Unit	50.000.000	Swadaya
	2. Turap Beton Depan Kantor Desa	100	M	155.000.000	APBDesa
	3. Draenase jalan lingkungan depan Kantor Desa	245	M	149.695.000	APBDesa
	4. Draenase jalan Utama (Blok F/G)	665	M	406.316.000	APBDesa
	5. Semensisasi jalan utama	300	M	220.500.000	APBDesa
	6. Semenisasi dan pertanaman halaman Kantor Desa Tebal 10cm	200	M	30.000.000	Swadaya
	7. Semenisasi Jalan 20cm x 80cm	297	M	43.659.000	APBDesa
	- Kasun II	135	M	19.845.000	APBDesa
	- Kasun III				
	8. Semenisasi Jalan 20cm x 80cm	563	M	121.608.000	APBDesa
	- Kasun I (ladang Timur)	180	M	37.800.000	APBDesa
	- Kasun III	250	M	30.000.000	Swadaya
	- Jalan Kecamatan (Patok 2000)				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II	Ekonomi				
	9. Pembangunan Tempat Pasar Parkir Senin	1	Unit	15.000.000	APBDesa
	10. Jalan Baru Ladang Timur	2	Km	20.000.000	APBDesa
III	Sosial				
	11. Gapura TPU	1	Unit	10.000.000	APBDesa
	12. Pagar TPU	50	M	35.000.000	APBDesa

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2017

Dalam data tersebut pemerintah desa Suligi belum mampu mencapai mencapai Rp 200 juta dalam ambang batas kemampuan desa dalam proses menyelesaikan kemampuan kewajiban terhadap keuangan desa yang dimilikinya. Tentu hal ini akan menjadi penghambat terhadap persoalan kemampuan modal dalam proses pembangunan dan menjadi alasan mengapa desa suligi tak kunjung maju, sebenarnya kendala dalam proses pembangunan desa suligi telah dilakukan berulang kali, akan tetapi permasalahan tak kunjung terselesaikan, karena setiap desa berbeda-beda dalam mendapatkan dana.

Untuk itu pemerintah pusat melalui sebuah regulasi dengan lahirnya undang-undang No 06 tahun 2014 tentang pemerintah desa bertujuan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. karena dalam konteksnya didalam undang-undang tersebut pemerintah pusat dapat memberikan *punishment* atau sanksi terhadap pemerintahan di desa yang tidak patuh terhadap program nasional. Dengan memberikan berupa sanksi-sanksi bahkan sampai menjatuhkan sanksi tegas. Namun dalam prosesnya tidak terjadi sebuah kontrol akan keberlangsungan kebijakan tersebut maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajar apabila banyak proyek nasional yang tidak direspon dan didukung dengan desa baik berupa teknis dan non teknis untuk mensukseskan kemajuan kondisi ekonomi pedesaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa proses pembangunan di desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto belum maksimal dilaksanakan. Dan oleh oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**”.

1.2. Perumusan Masalah

Bedasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dalam kebijakan pembangunan didesa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto sebagaimana dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini adalah:”

1. Bagaimana Proses Pembangunan di desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pembangunan Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelian ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses Pembangunan Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat pembangunan Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di desa Suligi
2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi keputusan di fakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya universitas hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahap-tahap atau aturan yang digunakan sebagai acuan membuat skripsi penelitian. Dapat diartikan sebagai sebuah usulan yang dibuat secara ringkas yang menggambarkan apa saja aspek yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian, kemudian dirancang dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Secara sistematis susunan skripsi adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuarikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas waktu dan lokasi, jenis dan sumber data, jenis dan suber data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukakan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik, dan demokrafi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang Analisis Kebijakan Pembangunan Di desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian bisa lebih baik lagi kedepannya.